Penguasaan tanah di DIY diubah agar sesuai dengan kepentingan modal besar, seperti megraproyek MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Di mana-mana, megaproyek ini dipromosikan sebagai pembangunan, meskipun hakikatnya adalah penjajahan ekonomi oleh sistem kapitalisme, walaupun menimbulkan konflik sosial dan merusak lingkungan hidup, karena MP3EI menyasaratkan pengambilalihan ruang hidup masyarakat demi pertambangan; industri berat; jalan tol; bandara internasional atau fasilitas jasa pertemuan; penginapan; dan wisata, seperti: **1**. Pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja di Kulonprogo**,** 2. Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo, **3.** Penggusuran pemukiman warga, di Parangkusumo**, 4**. Perampasan hak tanah melalui pembatalan hak milik atas tanah. Di Pundungsari, Kecamatan Semin, Gunungkidul, **5.** Perampasan hak tanah melalui perubahan status hak guna bangunan, **di** Jalan Solo, Kotabaru, Malioboro, **6.** Diskriminasi rasial/etnis melalui Pelarangan Hak Milik atas tanah, **di** Seluruh DIY, sejak 1975-1984 dan 1998-sekarang. **7.** Pembangunan Apartemen di kawasan padat penduduk, **di** Jalan Kaliurang km 5, Luas/jumlah 16.763 m^2 (luas bangunan apartemen), 1.660 m^2 (luas lahan), kedalaman sumur 60 m (mata air konsumsi warga pada kedalaman 10 m). sejak 2014-sekarang.

Dampak yang dirasakan paling besar adalah perempuan semakin dimiskinkan karena tanah, rumah, dan lahan/kebun merupakan sebagai sumber kehidupan terutama ekonomi telah hilang dan dirampas, sementara sampai sekarang kepastian akan memperoleh hak hidup yang lebih baik belum didaptkan, untuk bertahan hidup. Maka melihat kondisi tersebut, kami dari Solidaritas Perempuan Kinasih. Mengajak seluruh element masyarakat di DIY, untuk sama-sama menyerukan, yaitu :

1. Tegakkan UUPA di Yogyakarta
2. Kembalikan Hak atas kepemilikan tanah kepada Rakyat
3. Tolak Penjualan Tanah kepada Invertor asing, yang merusak merusak lingkungan dan memunculkan konflik social di masyarakat
4. Tolak pembangunan Mall,Hotel, dan Alfamart/Toko-Toko Modern di Yogyakarta
5. Kembalikan kedaulatan atas pengelolaan lahan/tanah kepada rakyat khususnya perempuan
6. Hentikan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan pabrik
7. Selesaikan seluruh konflik agraria di Indonesia dan terutama di Yogyakarta
8. Pengakuan terhadap perempuan petani dalam mewujudkan reforma agraria berkeadilan gender

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan serukan kepada seluruh masyarakat DIY.

Yogyakarta, 22 Oktober 2015

Atas Nama

(Solidaritas Perempuan Kinasih)

Salam Solidaritas..!!! Salam Perjuangan..!!!